



DOKUMEN (LKjIP)

TAHUN 2025

DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN
(DPUPR-PKP) Tahun 2026
KOTA PROBOLINGGO

Jl. Hayam Wuruk No. 69, Kota Probolinggo

Telp. (0335) 421 481

dpupr@probolinggokota.go.id

dpuprpkp.kotaprobolinggo@gmail.com

KATA PENGANTAR

Dalam era globalisasi dewasa ini terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan *legitimate*, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dengan dilatarbelakangi hal tersebut di atas diperlukan suatu sistem dan mekanisme kinerja aparatur pemerintah yaitu dalam perencanaan strategis yang merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah yang memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional, dan global.

Perencanaan strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo memaparkan visi, misi, lingkungan strategis, tujuan dan sasaran organisasi, serta strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang mencakup program selama 5 (lima) tahun ke depan yang dijabarkan dalam program dan kegiatan riil.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak dan berharap agar LKJIP ini dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan di lingkup Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo.

Probolinggo, 29 Januari 2026

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Penataan Ruang, Perumahan
dan Kawasan Permukiman
Kota Probolinggo



Setiaini Sayekti, S.K.M, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740527 199703 2 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 dan Rencana Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 ini pada hakikatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2025.

Dalam upaya merealisasikan good governance, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented governance). Pemerintahan yang berorientasi pada hasil akan fokus pada pelayanan bagi masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Laporan Kinerja tahun 2025 sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang disusun secara sistematis dan melembaga sebagai hasil capaian kinerja kegiatan dengan memanfaatkan secara optimal sumber daya yang dimiliki, pengetahuan antisipatif, manajemen secara sistematis, efisien, efektif, responsif dan akuntabel, serta mampu mengukur hasil kinerjanya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis, sehingga dapat dicapai sasaran sesuai target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo Tahun 2025-2029.

Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman dimulai dari perencanaan strategis, yang meliputi proses penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran yang kemudian dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kinerja Tahunan dan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja. Pada tahap selanjutnya dilaksanakan pengukuran kinerja, evaluasi dan analisa akuntabilitas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang dimuat dalam Penetapan Kinerja.

Untuk memperoleh gambaran keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman, ditetapkan metode pengukuran kinerja untuk mendapatkan gambaran secara rinci pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran.

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian yang sistematis dan bertahap untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis dan perencanaan kinerja tahunan. Pengukuran kinerja tahun 2025 dilaksanakan terhadap kinerja realisasi capaian penetapan kinerja tahun 2025 dan dilakukan terhadap indikator hasil (outcome).

Hasil realisasi pelaksanaan tugas atau Pencapaian Kinerja tahun anggaran 2025 pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan alat ukur lima Indikator Kinerja Utama yaitu Indikator 1 adalah Indeks Kualitas Layanan infrastruktur (IKLI) sebesar 31,50%, Indikator 2 adalah Persentase Infrastruktur Berkualitas Baik sebesar 11,10%, Indikator 3 adalah Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai Rencana Tata Ruang sebesar 97,75%, Indikator 4 adalah Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan sebesar 100%, serta Indikator 5 adalah Indeks Tertib Administrasi Pertanahan sebesar 23,35% dan Nilai SAKIP Akuntabilitas (Sistem Kinerja Instansi Pemerintah) pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman .

Demikian Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2025 disusun dan merupakan gambaran Kinerja yang menyajikan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Organisasi

1.1.1 Pembentukan Organisasi

Kelembagaan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman diatur dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 63 Tahun 2022 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.

1.1.2 Kedudukan Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman, serta Pertanahan yang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo dalam melaksanakan tugasnya untuk menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan daerah dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman, serta Pertanahan;
2. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman, serta Pertanahan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman, serta Pertanahan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas daerah dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman, serta Pertanahan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

1.1.3 Struktur Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo merupakan Unit Kerja dengan Susunan Organisasi terdiri dari :

- Kepala Dinas
- Sekretariat, membawahi :
 - Subbagian Tata Usaha
 - Subbagian Keuangan
 - Jabatan Fungsional Perencana

Bidang Cipta Karya, membawahi :

Jabatan Fungsional :

- Teknik Penyehatan Lingkungan
- Teknik Tata Bangunan dan Perumahan
- Pembina Jasa Konstruksi

Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, membawahi :

- Seksi Pertanahan

Jabatan Fungsional :

- Penata Ruang
- Analis Kebijakan

Bidang Bina Marga, membawahi :

Jabatan Fungsional :

- Teknik Jalan dan Jembatan
- Analis Kebijakan

Bidang Sumber Daya Air, membawahi :

Jabatan Fungsional :

- Teknik Pengairan
- Analis Kebijakan

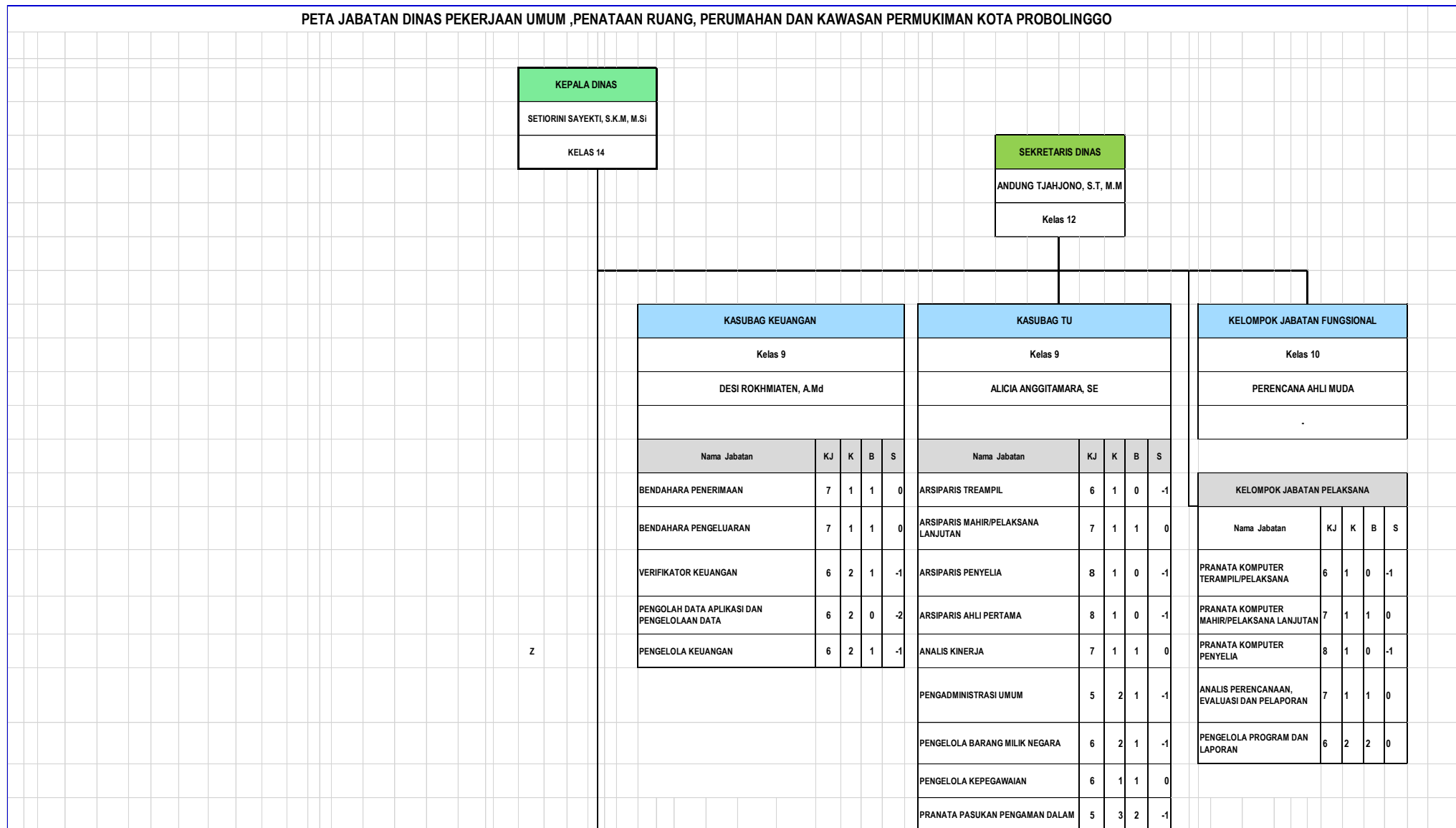
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, membawahi :

Jabatan Fungsional :

- Teknik Tata Bangunan dan Perumahan
- Analis Kebijakan

Unit Pelaksana Teknis yaitu Kepala UPT Rumah Susun

1.1. 3.1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo



KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR					KEPALA BIDANG BINA MARGA					KEPALA BIDANG CIPTA KARYA					KEPALA BIDANG TATA RUANG DAN PERTANAHAN					KEPALA BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
SUNARKO, S.T, M.M					TAUFIK HIDAYAT, S.P, M.M					RAHMAN KURNIADI, S.T, M.T					HARI SETIYONO, S.T, M.T					ACHSAN JAMALURRUSID, S.T., M.T				
Kelas 11					Kelas 11					Kelas 11					Kelas 11					Kelas 11				
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL					KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL					KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL					KEPALA SEKSI PERTANAHAN					KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL				
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA / KELAS JABATAN 10					ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA / KELAS JABATAN 10					PEMBINA JASA KONSTRUKSI AHLI PERTAMA/ KELAS JABATAN 8					Kelas 9					ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA / KELAS JABATAN 10				
-					-					R.M FALAQ ABROR ABSHARI, S.T					YUNI ANGGRAENI, S.T									
TEKNIK PENGAIRAN TERAMPIL /KELAS JABATAN 6					TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA / KELAS JABATAN 8					PEMBINA JASA KONSTRUKSI AHLI MUDA					Nama Jabatan Pelaksana					TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN AHLI PERTAMA /KELAS JABATAN 8				
-					ROSSY MARCIANUS REGGAR, S.T					-					ANALIS PERTANAHAN					EDI SUSANTO, S.T, M.M				
TEKNIK PENGAIRAN MAHIR /KELAS JABATAN 7					FRISKA DIAH AYU PUSPITASARI, S.T					TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA					JURU PUNGUT RETRIBUSI					TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN AHLI MUDA /KELAS JABATAN 9				
-					TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN AHLI MUDA / KELAS JABATAN 9					-					PENGELOLA DATA FASILITASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERTANAHAN									
TEKNIK PENGAIRAN PENYELIA /KELAS JABATAN 8					IKA KRISTINA DEW, S.S.T, M.M					TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI MUDA / KELAS JABATAN 9					PENGOLAH DATA SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN									
-					TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN AHLI MUDA / KELAS JABATAN 9					SRI INDRİYANI, S.T, M.Si					6					TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN TERAMPIL /KELAS JABATAN 6				
TEKNIK PENGAIRAN AHLI PERTAMA /KELAS JABATAN 8					BENY CANDRA ADITAMA, S.T, M.T					TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN TERAMPIL					Nama Jabatan Pelaksana					-				
-					TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN TERAMPIL / KELAS JABATAN 6					-					ANALIS PERTANAHAN					TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN MAHIR /KELAS JABATAN 7				
TEKNIK PENGAIRAN AHLI MUDA /KELAS JABATAN 9					-					TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN MAHIR/PELAKSANA LANJUTAN					JURU PUNGUT RETRIBUSI					-				
-					TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN MAHIR / KELAS JABATAN 7					-					PENGELOLA DATA FASILITASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERTANAHAN					TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN MAHIR /KELAS JABATAN 8				
-					-					TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN PENYELIA					PENGOLAH DATA SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN					-				
					TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN PENYELIA / KELAS JABATAN 8					-					6									
					-					TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN AHLI PERTAMA /KELAS JABATAN 8														
Nama Jabatan Pelaksana										RIZKIA SETYA BUDIASTUTI, S.T										Nama Jabatan Pelaksana				
KJ															KJ					KJ				
K															K					K				
B															B					B				
S															S					S				

1.1.4 Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo didukung oleh pegawai sebanyak 131 orang. Data mengenai komposisi pegawai Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo secara rinci dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1.4.1
Komposisi Pegawai Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jabatan	Jumlah		
	L	P	Total
PNS	42	18	60
PPPK	2	1	3
PPPK Paruh Waktu	59	9	68
Total	103	28	131

Tabel 1.1.4.2
Komposisi PNS Berdasarkan Golongan

Golongan	Jumlah
	Total
IV	5
III	30
II	25
I	0
Total	60

Tabel 1.1.4.3
Komposisi PNS Berdasarkan Pendidikan

Jenjang	Jumlah		
	L	P	Total
SD	0	0	0
SMP	7	0	7
SMA	13	7	21
D1	0	0	0
D2	0	0	0
D3	5	4	9
S1	11	6	17
S2	8	2	10
S3	0	0	0
Total	41	19	60

1.2 Permasalahan Utama yang Dihadapi Oleh Instansi

Isu-isu strategis dalam bidang pekerjaan umum dapat dijumpai dalam beberapa bidang kemasyarakatan yang merupakan wilayah kerja pekerjaan umum meliputi Bina Marga, Cipta karya, Sumber Daya Air, Tata Ruang, Pertanahan, Perumahan, Kawasan Permukiman, serta sarana dan prasarana umum lainnya. Adapun isu-isu strategis tersebut dapat dijabarkan, sebagai berikut:

a. Bidang Bina Marga, yaitu:

Masih banyaknya kebutuhan perbaikan jalan serta saluran drainase perkotaan maupun kebutuhan pembangunan jalan baru di wilayah kota probolinggo terutama wilayah selatan merupakan kebutuhan utama sebagai salah satu upaya penyediaan Pelayanan Minimal kepada masyarakat yang harus diprogramkan setiap tahunnya. Kebutuhan tersebut meliputi Jalan Nasional, Jalan Propinsi, Jalan Kota maupun Jalan Penghubung (kolektor) sebagai akses utama penunjang perekonomian Daerah.

b. Bidang Cipta Karya, yaitu:

Sebagai salah satu kota tujuan investasi maka kebutuhan infrastruktur berupa gedung-gedung pemerintah, Fasilitas Umum dan bangunan lainnya harus disiapkan oleh Daerah agar menjadi daya tarik investor untuk menanamkan modalnya di Kota Probolinggo. Disamping itu penyediaan Sarana Air Bersih, Sanitasi Sehat, Pemeliharaan Tempat peribadatan, Sarana Olah Raga, Fasilitas Umum dan lainnya

harus diprogramkan setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

c. Bidang Sumber Daya Air, yaitu:

Akibat cuaca yang tidak menentu menjadikan beberapa daerah termasuk Kota Probolinggo menjadi daerah rawan bencana. Oleh karenanya antisipasi potensi bencana terutama bencana banjir harus terus menerus diupayakan dan diminimalisir dengan penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur sungai dan irigasi yang memadai. Sekaligus sebagai upaya penyediaan kecukupan air bagi pertanian dan ketahanan pangan di Kota Probolinggo.

d. Bidang Tata Ruang, dan Pertanahan, yaitu:

Isu Strategis yang dijumpai pada Bidang Tata Ruang dan Pertanahan yaitu Peningkatan upaya pengendalian pemanfaatan ruang serta Peningkatan pemasyarakatan PBG dan pengawasan bangunan.

e. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu:

Program penyediaan lingkungan sehat Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk menanggulangi kawasan kumuh Kota Probolinggo akan terus diintensifkan dalam tahun 2025-2029 dan akan lebih baik jika Kota Probolinggo semua Perumahan dan Kawasan Permukimannya terbebas dari Kawasan Kumuh. Adapun Isu Strategis yang dijumpai pada Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman antara lain Peningkatan kualitas Sarana dan Prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman, Peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan yang terjangkau serta Optimalisasi pelaksanaan serah terima fasum dalam pengembangan perumahan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah serta indikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Rencana Strategis merupakan proses yang berkelanjutan dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Oleh karena itu agar mampu beradaptasi dan respon terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh.

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 yang memuat visi dan misi Kota Probolinggo sebagai upaya peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo. Berikut Visi dari Kota Probolinggo adalah :

1. Visi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan Visi RPJMD adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun. Secara politis, visi merupakan manifestasi dari cita-cita kepala daerah dalam membangun sebuah daerah. Hal yang perlu diperhatikan dalam perumusan Visi, idealnya adalah visi dapat menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Visi diciptakan bukan hanya cita-cita atau serangkaian harapan, visi adalah suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan.

Visi RPJMD Kota Probolinggo tahun 2025-2029 tidak dapat disusun terlepas dari kesesuaian terhadap sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan

pembangunan RPJPD periode ke 1. Selain itu Visi harus melihat dinamika pembangunan di Kota Probolinggo yang direpresentasikan melalui permasalahan dan isu strategis pembangunan di tahun berkenaan. Mempertimbangkan pada sub bab sebelumnya dimana dijelaskan poin-poin permasalahan dan isu strategis di Kota Probolinggo, maka Visi Pembangunan Kota Probolinggo sebagaimana dirumuskan dalam RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut **“Mewujudkan Kota Probolinggo yang Tangguh, Berkelanjutan, Sejahtera, Modern, dan Adaptif”** Makna yang terkandung dalam visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

Visi ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam membangun Kota Probolinggo sebagai kota yang mampu menghadapi berbagai tantangan perubahan zaman, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata, memperkuat daya saing daerah, serta mendorong transformasi menuju kota modern berbasis inovasi dan teknologi yang tetap berakar pada nilai-nilai kearifan lokal.

2. Misi

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai satu organisasi instansi pemerintah harus memastikan agar visi yang telah ditetapkan bersama dapat diupayakan perwujudannya. Untuk kepentingan itu harus disusun suatu tahapan yang secara umum akan terbagi kedalam dua tahapan yakni apa yang hendak dicapai dan bagaimana upaya untuk mencapainya. Salah satu unsur dalam tahapan tersebut adalah penetapan misi organisasi yang dalam hal ini adalah misi SKPD.

Dalam rangka mewujudkan visi-nya maka ditetapkan misi yang di emban Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo tahun 2025-2029 yaitu Misi V Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 yang fokus terhadap infrastruktur berkelanjutan sebagai berikut :

“Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Penggerak Ekonomi yang Berwawasan Lingkungan”

Memahami makna tersurat maupun tersirat dari misi V diatas maka ditetapkanlah kinerja tujuan dan sasaran mewujudkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan Kota Probolinggo sebagai berikut:

a. Pemerataan dan Pemantapan Infrastruktur Perkotaan, kemudian sebagai kesatuan rangkaian kinerja dari agregat pembangunan Kota Probolinggo maka

berikut merupakan sasaran tujuan pertama dalam pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan Kota Probolinggo Tahun 2025-2029:

- 1) Pengembangan infrastruktur Berbasis Instrumen Penataan Ruang untuk mendukung konektivitas antar wilayah

Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Misi V RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 yang menguraikan mulai dari Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran, dapat dengan mudah dipahami melalui desain cascading misi V yang disajikan sebagai berikut:



Pemerataan dan pematapan infrastruktur menjadi prioritas, melalui pengembangan yang terintegrasi dengan instrumen penataan ruang guna meningkatkan konektivitas antar wilayah secara optimal. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan infrastruktur sekaligus memperluas akses dan efisiensi mobilitas, yang tercermin dari peningkatan indeks infrastruktur dan rasio konektivitas. Dengan langkah-langkah tersebut, pembangunan infrastruktur tidak hanya menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan kota yang tangguh dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi kriteria *specific, measurable, aggressive but attainable, result oriented* dan *time bond*. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

SASARAN KOTA	INDIKATOR SASARAN KOTA	TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	TARGET 2025	TARGET 2026	TARGET 2027	TARGET 2028	TARGET 2029	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pengembangan infrastruktur Berbasis Instrumen Penataan Ruang untuk mendukung konektivitas antarwilayah	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Pemerataan dan Pemantapan Infrastruktur Perkotaan	Indeks Infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan	Persentase Infrastruktur Berkualitas Baik	76,88%	77,64%	78,4%	79,16%	79,92%	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat kemantapan jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Kondisi Jalan dan jembatan dalam kondisi mantap
											Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase cakupan jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perpipaan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sambungan Rumah Dalam Kondisi baik
											Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah	Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sistem Air Limbah Domestik dalam kondisi baik
											Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) yang dikelola sesuai ketentuan

							Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam kondisi baik	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam kondisi baik
Meningkatnya Pemanfaatan Ruang Kota sesuai Rencana Tata Ruang	Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai Rencana Tata Ruang	100%	100%	100%	100%	100%	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase Rencana Tata Ruang yang ditetapkan
									Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah yang di koordinasikan

SASARAN KOTA	INDIKATOR SASARAN KOTA	TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	TARGET 2025	TARGET 2026	TARGET 2027	TARGET 2028	TARGET 2029	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	99,52%	99,525%	99,55%	99,575%	99,6%	Program Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Permukiman yang difasilitasi	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang direkomendasikan untuk diterbitkan izin
											Program Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Permukiman yang difasilitasi	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10	Panjang Jalan Lingkungan dan Drainase Lingkungan yang Terbangun dan Terpelihara dengan Baik

							Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase PSU Perumahan dalam kondisi baik	(Sepuluh) Ha Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase PSU Perumahan dalam kondisi baik
Meningkatnya tata kelola pertanahan	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	100%	100%	100%	100%	100%	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Permasalahan Pertanahan yang terselesaikan	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Permasalahan Pertanahan yang difasilitasi
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP Akuntabilitas (Sistem Kinerja Instansi Pemerintah) pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	80%	80,25%	80,50%	80,75%	81%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80 %	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%

2.2 Program dan Kegiatan

Program operasional pada dasarnya merupakan langkah implementasi kebijakan pembangunan daerah dan merupakan penjabaran secara rinci langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan pembangunan daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan kebijakan umum yang telah disepakati, maka program dan kegiatan yang merupakan belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo Tahun 2025 sebagai berikut :

❖ **Bagian Sekretariat**

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- Kegiatan Pemeliharaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

❖ **Bidang Sumber Daya Air**

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

- Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota.

❖ **Bidang Bina Marga**

Program Penyelenggaraan Jalan

- Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota;

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

- Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota.

❖ Bidang Cipta karya

Program Penataan Bangunan Gedung

- Penyelenggaraan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Gedung;

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum

- Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

- Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

Program Pengembangan Jasa Konstruksi

- Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

❖ Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

- Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota

Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

- Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

- Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota

❖ Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Program Kawasan Permukiman

- Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
- Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

- Kegiatan Penyelenggaraan PSU Perumahan

Program Pengembangan Perumahan

- Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

❖ UPT Rumah Susun

Program Pengembangan Perumahan

- Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus

Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka perlu diimplementasikan ke dalam program, kegiatan dan pendanaan. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program yang ada dapat dikelompokkan menjadi program yang mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran dan program yang tidak mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran. Untuk tahun 2025 ada 14 Program pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo sebagai berikut :

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN PROGRAM
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 12.455.613.040,00
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 90.330.146,00
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 9.219.848.542,00
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 45.000.000,00
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1.685.032.886,00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 666.845.646,00
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 748.555.820,00

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN PROGRAM
2.	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp 14.222.625.823,00
	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rp 14.222.625.823,00
3.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp 2.943.597.764,00
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.943.597.764,00
4.	Program Kawasan Permukiman	Rp 4.559.140.000,00
	Kegiatan Penerbitan Ijin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Rp 2.571.500.000,00
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Rp 1.987.640.000,00
5.	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp 12.557.102.011,00
	Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rp 12.557.102.011,00
6.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp 534.053.500,00
	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Rp 534.053.500,00
7.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp. 2.500.000,00
	Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Rp. 2.500.000,00
8.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp 2.475.972.820,00
	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.475.972.820,00

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN PROGRAM	
9.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp	1.106.543.764,00
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Rp	1.106.543.764,00
10.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp	6.267.050.764,00
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp	6.267.050.764,00
11.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp	930.471.882,00
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Rp	858.471.882,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Rp	72.000.000,00
12.	Program Pengembangan Perumahan	Rp	1.253.544.416,00
	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Rp	1.109.394.416,00
	Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Rp	27.150.000,00
	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	Rp	117.000.000,00
13.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp	4.483.120.882,00
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Rp	4.483.120.882,00
14.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp	248.736.882,00
	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/kota	Rp	248.736.882,00
TOTAL		Rp	64.040.123.548 ,00

2.3 Perjanjian Kinerja

Sasaran yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo terdiri dari indikator kinerja yang wajib dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo selama kurun waktu 5 (lima) tahun pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo mulai Tahun 2025 s/d 2029.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita jangka menengah tersebut, maka disusunlah Penetapan Kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo. Penetapan Kinerja ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun Anggaran 2025, Penetapan Kinerja disajikan sebagaimana tabel berikut :

PENETAPAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2025

NO	SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	TARGET
1.	Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Infrastruktur Berkualitas	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	83,02 %
2.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan	Persentase Infrastruktur Berkualitas Baik	76,88 %
3.	Meningkatnya Pemanfaatan Ruang Kota sesuai Rencana Tata Ruang	Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai Rencana Tata Ruang	100 %
4.	Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	99,52 %
5.	Meningkatnya tata kelola pertanahan	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	100 %
6.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP Akuntabilitas (Sistem Kinerja Instansi Pemerintah) pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	80%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis. Pengukuran kinerja mencakup tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintahan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen penetapan kinerja.

Berdasarkan sasaran yang akan dicapai sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Probolinggo Tahun 2025 s/d 2029, Visi, Misi dan Tujuan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, dituangkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2025. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

3.1.1 Capaian kinerja sasaran Pengembangan infrastruktur Berbasis Instrumen Penataan

Ruang untuk mendukung konektivitas antar wilayah

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja 2025

Tabel 3.1

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Persentase
1	2	3	4	5
1.	Indeks Kualitas Layanan infrastruktur (IKLI)	Target Indeks Kualitas Layanan infrastruktur (IKLI) sebesar 83,02%	Target Indeks Kualitas Layanan infrastruktur (IKLI) sebesar 82,77%	99,69 %
2.	Persentase Infrastruktur Berkualitas Baik	Target Infrastruktur Berkualitas Baik yaitu 76,88 %	Infrastruktur Berkualitas Baik adalah sebesar 92,35 %	120,12 %
3.	Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai Rencana Tata Ruang	Target Pemanfaatan Ruang sesuai Rencana Tata Ruang yaitu 100%	Realisasi Pemanfaatan Ruang sesuai Rencana Tata Ruang yaitu 100%	100 %

4.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan Indeks	Target Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan sebesar 99,52 %	Realisasi Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan yaitu	99,51 %
5.	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	Target Tertib Administrasi Pertanahan sebesar 100%	Realisasi Tertib Administrasi Pertanahan 100 %	100 %
6.	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Target Nilai SAKIP Akuntabilitas (Sistem Kinerja Instansi Pemerintah) sebesar 80 %	Realisasi Nilai SAKIP Akuntabilitas (Sistem Kinerja Instansi Pemerintah) sebesar 77,39 %	96,73 %

b. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

Tabel 3.2

	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ANGGARAN		
					PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
	1	2	3	4	5	6	7
1	Indeks Kualitas Layanan infrastruktur (IKLI)	83,02 %	82,77 %	99,69 %	34.153.322.362	26.177.884.166	76,64
2	Persentase Infrastruktur Berkualitas Baik	76,88 %	92,35 %	120,12 %	45.314.050.477	37.610.914.726	83,005 %
3	Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai Rencana Tata Ruang	100 %	100 %	100 %	930.471.882	735.885.156	79,08 %
4	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	99,52 %	99,51%	99,98 %	4.483.120.882	4.229.018.969	94,33 %
5	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	100 %	100 %	100 %	248.736.882	98.744.986	39,69 %
6	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	80 %	77,39 %	96,73 %	90.330.146	89.708.508	99,31 %

c. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Tabel 3.3
Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

NO	SASARAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
	1	3	4	5
1.	Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Infrastruktur Berkualitas	99,69 %	76,64 %	Efisiensi = 99,69 – 76,64 % = 23,05 % (EFISIEN)
2.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan	120,12 %	83,005 %	Efisiensi = 120,12 – 83,005 % = 37,115 % (EFISIEN)
3.	Meningkatnya Pemanfaatan Ruang Kota sesuai Rencana Tata Ruang	100 %	79,08 %	Efisiensi = 100 – 79,08 % = 20,92 % (EFISIEN)
4.	Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	99,52 %	94,33 %	Efisiensi = 99,52 – 94,33 % = 5,19 % (EFISIEN)
5.	Meningkatnya tata kelola pertanahan	100 %	39,69 %	Efisiensi = 100 – 39,69 % = 60,31 % (EFISIEN)
6.	Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	96,73 %	99,31 %	Efisiensi = 96,73 – 99,31 % = - 2,58 % (TIDAK EFISIEN)

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Peningkatan dan Kegagalan/ Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.4
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN	ALTERNATIF SOLUSI YG DILAKUKAN
	2		3	4	5
1.	Indeks Kualitas Layanan infrastruktur (IKLI)	83,02 %	82,77 %	Kebahagiaan peningkatan kepuasan pengguna atau Masyarakat terhadap kinerja pelayanan infrastruktur publik (jalan, air bersih, sanitasi, bangunan gedung pemerintah dan layanan PBG) dari target yang ditentukan disebabkan karena kecepatan dan ketanggapan Dinas PU dalam pelaksanaan perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur kota serta respon cepat dalam	-

				penanganan pengaduan.	
2.	Persentase Infrastruktur Berkualitas Baik	76,88 %	92,35 %	Keberhasilan peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan ini disebabkan oleh kegiatan pemeliharaan preventif yang dilakukan secara konsisten, respon cepat terhadap kerusakan ringan sehingga tidak berkembang menjadi kerusakan berat	-
3.	Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai Rencana Tata Ruang	100 %	100 %	Pencapaian penyusunan dokumen RDTR 2 kecamatan yaitu kecamatan wonoasih dan kecamatan kademangan	
4.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	99,52 %	99,51 %	Keberhasilan peningkatan rumah tangga dengan akses hunian layak disebabkan oleh ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) di permukiman dan perumahan serta Penataan Kawasan permukiman kumuh	
5.	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	100 %	100 %	Pencapaian keberhasilan capaian indeks pertanahan disebabkan oleh terselesaikannya administrasi pertanahan	
6.	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	80 %	77,39	Kurang terpenuhinya target nilai SAKIP Tahun 2025 disebabkan oleh tidak adanya Inovasi Baru pada dinas PUPRPKP	

3.2 Realisasi Anggaran

Anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo tahun 2025 sebesar Rp 64.040.123.548,00 (Enam puluh empat milyar empat puluh juta seratus dua puluh tiga ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah). Anggaran tersebut terbagi dalam 2 (dua) kelompok belanja, yaitu Belanja Operasi dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut:

1. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dengan besaran anggaran Rp 35.754.881.812,00 (Tiga puluh lima milyar tujuh ratus lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua belas rupiah)
2. Belanja Modal terdiri dari belanja Modal peralatan dan mesin, belanja modal Gedung dan bangunan dengan besar anggaran sebesar Rp. 28.285.241.736,00 (Dua puluh delapan milyar dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah).

Tabel 3.2.1
Realisasi Anggaran Belanja Dinas PUPRKP Tahun 2025

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
1.	Belanja Operasi	Rp. 35.754.881.812,00	Rp. 32.626.851.693,00	91,25
2.	Belanja Modal	Rp. 28.285.241.736,00	Rp. 21.688.584.020,00	76,68

Tabel 3.2.2

Realisasi Anggaran Belanja Dinas PUPRKP Per Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025

URAIAN	Indikator kinerja	PAGU ANGGARAN (P.APBD) (Rp)	REALISASI (Rp)	%
PENDAPATAN		1.483.057.000,00	1.456.403.032,00	98,20%
PENDAPATAN ASLI DAERAH		1.483.057.000,00	1.456.403.032,00	
BELANJA		64.040.123.548,00	54.504.645.611,00	85,11%
BELANJA OPERASI (BELANJA PEGAWAI, BELANJA BARANG DAN JASA, BELANJA HIBAH)		35.754.881.812,00	32.632.311.591,00	
BELANJA MODAL		28.285.241.736,00	21.872.334.020,00	
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Sumber Daya Air Dalam Kondisi Baik	2.475.972.820,00	2.400.769.678	96,96%
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi dan Drainase yang Terbangun dan Terpelihara dengan Baik	2.475.972.820,00	2.400.769.678,00	96,96%
Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	906.860.882,00	893.629.506,00	98,54%
Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya	41.011.882,00	32.810.506,00	80,00%
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi dan Drainase yang Terbangun dan Terpelihara dengan Baik	1.370.340.056,00	1.334.249.666,00	97,37%
Pengelolaan dan Pengawasan Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	157.760.000,00	140.080.000,00	88,79%
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Cakupan Jaringan SPAM Perpipa	1.106.543.764,00	1.076.869.462,00	97,32%
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sambungan Rumah Dalam Kondisi baik	1.106.543.764,00	1.076.869.462	97,32%

Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang Terbangun	932.166.000,00	921.164.462	98,82%
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah unit SPAM/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	174.377.764,00	155.705.000,00	89,29%
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan Akses Layanan Air Limbah Domestik	6.267.050.764,00	5.891.322.212,00	94,00%
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana limbah domestik yang Terbangun dan Terpelihara	6.267.050.764,00	5.891.322.212,00	94,00%
Peningkatan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat skala permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang ditingkatkan	941.275.000,00	764.782.000,00	81,25%
Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	304.818.764,00	297.191.012,00	97,50%
Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	5.020.957.000,00	4.829.349.200,00	96,18%
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase Perkotaan dalam Kondisi Mantap	2.943.597.764,00	2.844.251.322,00	96,62%
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Pematusan / Drainase Jalan Kota yang Terbangun dan Terpelihara dengan Baik	2.943.597.764,00	2.844.251.322,00	96,62%
Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	150.000.000,00	149.894.400,00	99,93%
Operasi dan pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	2.793.597.764,00	2.694.356.922,00	96,45%
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Fasilitas Umum Sesuai Standar Jasa Konstruksi	12.557.102.011,00	5.185.218.436,00	41,29%
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Gedung	Jumlah Bangunan gedung Pemerintah dan Fasilitas Umum yang Terbangun dan Terpelihara dengan Baik	12.557.102.011,00	5.185.218.436,00	41,29%

Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Gedung (TABG), Pendataan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Gedung (TABG), Pendataan Gedung, serta Implementasi SIMBG	150.890.000,00	149.805.000,00	99,28%
Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	10.382.287.011,00	3.661.102.836,00	35,26%
Pemeliharaan ,Perawatan dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan gedung Pemerintah dan Fasilitas Umum yang dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	2.023.925.000,00	1.374.310.600,00	67,90%
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase IMB yang Terselesaikan Tepat Waktu	534.053.500,00	440.533.672,00	82,49%
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase IMB yang Terselesaikan Tepat Waktu	534.053.500,00	440.533.672,00	82,49%
Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	534.053.500,00	440.533.672,00	82,49%
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	14.222.625.823,00	14.024.474.056,24	98,61%
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan dan Jumlah Jembatan yang Terbangun dan terpelihara dengan Baik	14.222.625.823,00	14.024.474.056,24	98,61%
Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang terbangun	10.280.621.882,00	10.106.985.652,24	98,31%
Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang direhabilitasi	3.792.003.941,00	3.769.175.904,00	99,40%
Rehabilitasi Jembatan	Panjang jembatan yang dilakukan Rehabilitasi	50.000.000,00	49.800.000,00	99,60%
Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	100.000.000,00	98.512.500,00	98,51%
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Ijin Jasa Konstruksi yang terselesaikan Tepat Waktu	2.500.000,00	2.040.000,00	81,60%
Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Ijin Jasa Konstruksi yang sesuai dengan Ketentuan	2.500.000,00	2.040.000,00	81,60%
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	2.500.000,00	2.040.000,00	81,60%

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	930.471.882,00	735.885.156,00	79,09%
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana tata Ruang yang Disusun sesuai Ketentuan	858.471.882,00	670.885.156,00	78,15%
Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW kabupaten/kota	858.471.882,00	670.885.156,00	78,15%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Permasalahan tata ruang yang difasilitasi melalui TKPRD	72.000.000,00	65.000.000,00	90,28%
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan penataan ruang	72.000.000,00	65.000.000,00	90,28%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80 %	12.455.613.040,00	11.688.544.408,00	93,84%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Sesuai Ketentuan	9.219.848.542,00	8.893.197.283,00	96,46%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8.482.976.762,00	8.220.542.707,00	96,91%
Pelaksanaan PenataUsahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	736.871.780,00	672.654.576,00	91,29%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi PD sesuai Ketentuan	1.685.032.886,00	1.401.505.104,00	83,17%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	35.335.000,00	24.467.330,00	69,24%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	262.310.000,00	241.367.686,00	92,02%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	439.507.386,00	380.036.368,00	86,47%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	164.070.000,00	160.147.206,00	97,61%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	4.800.000,00	3.000.000,00	62,50%
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	97.812.000,00	92.900.925,00	94,98%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	320.360.000,00	162.031.500,00	50,58%

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	252.445.000,00	242.201.558,00	95,94%
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	99.027.500,00	86.478.724,00	87,33%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu	666.845.646,00	576.814.262,00	86,50%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	346.030.000,00	310.289.008,00	89,67%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	320.815.646,00	266.525.254,00	83,08%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD yang Terpenuhi	748.555.820,00	711.419.251,00	95,04%
Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11.786.300,00	7.812.967,00	66,29%
Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	316.769.520,00	286.261.400,00	90,37%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	190.000.000,00	187.628.350,00	98,75%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	140.000.000,00	139.750.000,00	99,82%
Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	90.000.000,00	89.966.534,00	99,96%
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Permasalahan Pertanahan yang terselesaikan	248.736.882,00	98.744.986,00	39,70%
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Permasalahan Pertanahan yang Difasilitasi	248.736.882,00	98.744.986,00	39,70%
Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	248.736.882,00	98.744.986,00	39,70%
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Ijin Site Plan yang terselesaikan Tepat Waktu	1.253.544.416,00	1.242.027.030,00	99,08%

Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana yang mendapatkan fasilitas Rehabilitasi atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	117.000.000,00	115.334.450,00	98,58%
Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	117.000.000,00	115.334.450,00	98,58%
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Fasilitas Rumah susun Dalam Kondisi baik	1.109.394.416,00	1.100.179.461,00	99,17%
Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1.109.394.416,00	1.100.179.461,00	99,17%
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan	Persentase Ijin Site Plan yang sesuai Ketentuan	27.150.000,00	26.513.119,00	97,65%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	27.150.000,00	26.513.119,00	97,65%
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Lingkungan yang sehat dan Aman yang Didukung oleh PSU	4.483.120.882,00	4.229.018.969,00	94,33%
URUSAN Penyelenggaraan PSU PERUMAHAN	Persentase PSU Perumahan yang telah diserahkan pada Pemerintah Kota	4.483.120.882,00	4.229.018.969,00	94,33%
Penyediaan Prasarana, Sarana , dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	4.483.120.882,00	4.229.018.969,00	94,33%
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Jalan Lingkungan dan Drainase Lingkungan dalam Kondisi Mantap	4.559.140.000,00	4.455.736.326,00	97,73%
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase ijin site plan yang sesuai dengan ketentuan	2.571.500.000,00	2.533.914.676,00	98,54%
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	2.571.500.000,00	2.533.914.676,00	98,54%
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Panjang Jalan Lingkungan dan Drainase Lingkungan yang Terbangun dan Terpelihara dengan Baik	1.987.640.000,00	1.921.821.650,00	96,69%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1.987.640.000,00	1.921.821.650,00	96,69%

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo Tahun 2025 merupakan bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi atas pengelolaan sumber daya sesuai dengan kewenangan atau mandat yang diterima. LKjIP melaporkan capaian kinerja (*performance results*) sesuai rencana kinerja (*performance plan*) dan Arah Kebijakan Umum Pelaksanaan APBD Tahun 2025 sehingga dapat dijadikan bahan pengambilan keputusan perencanaan tahun ke depannya.

LKjIP ini akan berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang baik. Oleh karena itu LKjIP ini diharapkan dapat menjadi motivasi kinerja yang lebih baik dan profesional sehingga dari nilai capaian kegiatan yang dilaksanakan menghasilkan manfaat yang sangat berguna sebagaimana visi dan misi Pemerintah Kota Probolinggo.

LKjIP ini mungkin belum dapat mencapai hasil yang optimal dibandingkan tujuan utamanya, LKjIP Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo Tahun 2025 merupakan tahun ketiga perencanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Probolinggo tahun 2025-2029 namun dengan selesainya penyusunan laporan ini diharapkan dapat lebih memahami tentang rencana strategis selama 5 tahun ke depan serta pengembangannya di masa yang akan datang. Mendorong tindakan perbaikan terus-menerus dalam pencapaian kinerja terutama dalam pelayanan yang berkualitas efektif dan efisien.